

PERKEMBANGAN MINANGKABAU PASCA KEMERDEKAAN ERA PERIODE REVOLUSI FISIK

Halsizza Dersha Andini¹, Hendra Naldi², Nada Hanifah³
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
dershaandini14@gmail.com¹, nadahanifah83@gmail.com³

ABSTRAK

Artikel ini membahas perkembangan masyarakat Minangkabau pasca kemerdekaan Indonesia pada era Revolusi Fisik (1945–1949). Periode ini merupakan fase krusial yang ditandai oleh dinamika politik, sosial, dan militer dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari upaya kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Minangkabau memiliki peran strategis sebagai basis perjuangan republik, baik melalui mobilisasi masyarakat, pembentukan pemerintahan darurat, maupun dukungan terhadap aktivitas militer dan diplomasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber sejarah berupa buku, dokumen resmi, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau tidak hanya berperan sebagai pendukung perjuangan fisik, tetapi juga sebagai aktor penting dalam konsolidasi pemerintahan dan penguatan struktur sosial-politik pasca proklamasi. Dengan demikian, Revolusi Fisik menjadi fondasi penting bagi pembentukan identitas politik dan peran Minangkabau dalam sejarah nasional Indonesia.

Kata Kunci: Minangkabau, Revolusi Fisik, pasca kemerdekaan, PDRI, sejarah Indonesia

ABSTRACT

This article examines the development of Minangkabau society after Indonesian independence during the Physical Revolution period (1945–1949). This era represents a critical phase marked by political, social, and military dynamics in defending the sovereignty of the Republic of Indonesia against the reassertion of Dutch colonial power. Minangkabau played a strategic role as a republican stronghold through community mobilization, the establishment of an emergency government, and support for military and diplomatic efforts. This study employs a literature review method by analyzing historical sources, including books, official documents, and relevant scholarly works. The findings indicate that the Minangkabau people were not only active participants in armed resistance but also played a significant role in governmental consolidation and the strengthening of socio-political structures after independence. Therefore, the Physical Revolution served as an essential foundation for shaping Minangkabau's political identity within Indonesian national history.

Keywords: *Minangkabau, Physical Revolution, post-independence, Emergency Government of the Republic of Indonesia, Indonesian history*

1. PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka, namun sekaligus membuka fase perjuangan baru dalam mempertahankan kedaulatan dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Periode Revolusi Fisik (1945–1949) merupakan masa penting dalam sejarah Indonesia, ditandai oleh konflik bersenjata, dinamika politik, serta mobilisasi masyarakat di berbagai daerah. Dalam konteks ini, peran daerah menjadi sangat signifikan karena menjadi basis pertahanan dan pendukung keberlangsungan Republik Indonesia.

Minangkabau di Sumatra Barat memiliki posisi strategis dalam periode Revolusi Fisik. Wilayah ini tidak hanya menjadi medan perlawanan terhadap agresi militer Belanda, tetapi juga berfungsi sebagai pusat konsolidasi pemerintahan dan perjuangan Republik Indonesia, terutama dengan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948. Kondisi geografis, jaringan sosial yang kuat, serta tradisi intelektual masyarakat Minangkabau menjadikan wilayah ini mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi perang dan ketidakstabilan politik.

Perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan ditandai oleh keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, ulama, pemuda, dan aparat pemerintahan daerah. Sinergi antara nilai adat

Minangkabau, ajaran Islam, dan semangat nasionalisme menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan masyarakat Minangkabau tidak hanya diwujudkan dalam bentuk perlawanan fisik, tetapi juga melalui pembentukan struktur pemerintahan lokal, penguatan solidaritas sosial, serta dukungan terhadap kebijakan Republik Indonesia di tingkat daerah.

Meskipun peran Minangkabau dalam Revolusi Fisik cukup menonjol, kajian yang secara khusus membahas perkembangan wilayah dan masyarakat Minangkabau pasca kemerdekaan masih relatif terbatas, terutama dalam perspektif sejarah lokal. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan pada era Revolusi Fisik (1945–1949) dengan menitikberatkan pada dinamika sosial dan politik masyarakatnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penulisan sejarah daerah serta memperkaya pemahaman mengenai peran Minangkabau dalam sejarah Revolusi Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan pada era Revolusi Fisik (1945–1949) melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen dan arsip yang berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Revolusi Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada karya-karya akademik yang membahas dinamika sosial, politik, dan peran masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada proses interpretasi terhadap isi sumber, konteks historis, serta keterkaitan antarperistiwa. Tahap analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu klasifikasi tema, penafsiran data, dan penyusunan sintesis hasil kajian. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap pola perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan serta peran berbagai unsur masyarakat dalam era Revolusi Fisik. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan kronologis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

3. TEMUAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa Keresidenan Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang relatif cepat dan stabil dalam merespons Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Meskipun bukan daerah pertama yang menerima kabar kemerdekaan, Sumatera Barat memiliki tingkat konflik internal yang lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lain di Sumatera. Kondisi ini didukung oleh kesiapan elite lokal dan kuatnya semangat pemuda yang mampu mengorganisasi diri secara cepat dalam berbagai wadah perjuangan. Wilayah ini kemudian berkembang sebagai salah satu pos terdepan Republik Indonesia di Sumatera.

Temuan selanjutnya memperlihatkan bahwa peran pemuda Minangkabau sangat dominan dalam fase awal pasca kemerdekaan. Pembentukan organisasi-organisasi kepemudaan seperti Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), serta Pemuda Indonesia (PI) menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi proklamasi dan mengarahkan perjuangan rakyat. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai

corong penerangan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong pembentukan lembaga pemerintahan daerah yang menggantikan institusi peninggalan Jepang seperti Hokokai, yang dinilai tidak mencerminkan semangat revolusi dan kemerdekaan.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat (KNID-SB) merupakan temuan penting lainnya yang menunjukkan kesadaran politik masyarakat Minangkabau dalam membangun pemerintahan sendiri pasca kemerdekaan. KNID-SB beserta cabang-cabangnya hingga tingkat nagari menjadi tulang punggung pemerintahan sipil di daerah, sekaligus simbol kebulatan tekad masyarakat Sumatera Barat dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Kehadiran KNID juga menandai transisi dari struktur kolonial dan pendudukan Jepang menuju pemerintahan nasional yang berlandaskan konstitusi Republik Indonesia.

Dalam konteks Revolusi Fisik, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau terlibat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan, baik melalui perlawanan bersenjata maupun dukungan terhadap strategi perang gerilya. Selama Agresi Militer Belanda I dan II, Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama rakyat melakukan perlawanan di berbagai front dengan memanfaatkan kondisi geografis dan dukungan masyarakat lokal. Meskipun Belanda berhasil menduduki kota-kota penting, kekuasaan mereka bersifat terbatas karena perlawanan rakyat tetap berlangsung, terutama pada malam hari melalui gerilya.

Puncak peran strategis Minangkabau dalam Revolusi Fisik terlihat pada pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948–1949. Sumatera Barat, khususnya daerah pedalaman seperti Halaban dan Suliki, menjadi basis utama kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia setelah jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda. Temuan ini menunjukkan bahwa

Minangkabau tidak hanya berperan sebagai wilayah pertahanan militer, tetapi juga sebagai pusat penyelamatan eksistensi negara Republik Indonesia pada masa kritis revolusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi literatur, Keresidenan Sumatera Barat menunjukkan respons yang relatif cepat dan terorganisasi terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Meskipun bukan wilayah pertama yang menerima kabar kemerdekaan, Sumatera Barat memiliki tingkat konflik internal yang lebih rendah dibandingkan daerah lain di Sumatera. Kondisi ini memungkinkan terjadinya konsolidasi kekuatan revolusi secara lebih efektif. Kesiapan elite lokal serta kuatnya semangat pemuda menjadi faktor penting yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu basis awal Republik Indonesia di Sumatera.

Peran pemuda Minangkabau tampak dominan pada fase awal pasca kemerdekaan. Pembentukan organisasi seperti Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), dan Pemuda Indonesia (PI) menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi proklamasi dan mengarahkan perjuangan rakyat. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai corong penerangan, tetapi juga menjadi kekuatan sosial-politik yang mendorong pembentukan lembaga pemerintahan daerah. Tekanan yang dilakukan pemuda untuk menggantikan Hokokai, yang dianggap sebagai alat propaganda Jepang dan tidak mencerminkan semangat revolusi, menunjukkan adanya kesadaran politik yang kuat di kalangan masyarakat Minangkabau.

Proses pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat (KNID-SB) merupakan hasil penting dari dinamika politik pasca kemerdekaan di wilayah ini. KNID-SB, beserta cabang-cabangnya hingga tingkat nagari, berperan sebagai tulang punggung pemerintahan sipil dalam kondisi revolusi. Kehadiran KNID mencerminkan kebulatan tekad masyarakat Sumatera Barat untuk segera memiliki tatanan pemerintahan sendiri yang sah dan berlandaskan Republik Indonesia. Pembentukan KNID juga menandai peralihan dari struktur pemerintahan kolonial dan pendudukan Jepang menuju sistem pemerintahan nasional yang lebih demokratis.

Dalam konteks Revolusi Fisik, masyarakat Minangkabau terlibat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik melalui perlawanan bersenjata maupun dukungan terhadap strategi perang gerilya. Selama Agresi Militer Belanda I dan II, Belanda memang berhasil menduduki kota-kota strategis di Sumatera Barat, namun penguasaan tersebut bersifat terbatas. Perlawanan yang dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama rakyat menyebabkan Belanda tidak pernah sepenuhnya menguasai wilayah pedalaman. Keterlibatan rakyat dalam perjuangan ini menunjukkan bahwa revolusi di Sumatera Barat bersifat kolektif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Puncak peran strategis Minangkabau dalam Revolusi Fisik terlihat pada pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948–1949. Setelah jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda, wilayah Sumatera Barat, khususnya daerah pedalaman seperti Halaban dan Suliki, menjadi pusat kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia.

Dukungan masyarakat terhadap PDRI memperlihatkan kuatnya kesadaran nasional dan solidaritas sosial di Minangkabau. Keberadaan PDRI menegaskan bahwa Minangkabau tidak hanya berperan sebagai wilayah pertahanan, tetapi juga sebagai penyelamat eksistensi negara Republik Indonesia pada masa kritis revolusi.

5. KESIMPULAN

Penyelewengan anggaran pendidikan merupakan Berdasarkan hasil kajian studi literatur, dapat disimpulkan bahwa Minangkabau, khususnya wilayah Keresidenan Sumatera Barat, memainkan peran penting dalam perkembangan Indonesia pasca kemerdekaan pada periode Revolusi Fisik (1945–1949). Kondisi sosial yang relatif stabil, rendahnya konflik internal, serta kesiapan elite lokal dan pemuda memungkinkan wilayah ini merespons Proklamasi Kemerdekaan secara cepat dan terorganisasi. Hal tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu basis awal konsolidasi kekuatan Republik Indonesia di Sumatera. Peran pemuda dan masyarakat Minangkabau menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kemerdekaan. Melalui pembentukan berbagai organisasi kepemudaan dan lembaga pemerintahan daerah, masyarakat tidak hanya berperan dalam perjuangan fisik, tetapi juga dalam pembangunan struktur pemerintahan sipil yang mendukung keberlangsungan negara. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan di Minangkabau bersifat kolektif dan berkelanjutan.

Puncak kontribusi Minangkabau dalam Revolusi Fisik tercermin dalam pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948–1949. Keberadaan PDRI di Sumatera Barat menegaskan peran strategis Minangkabau sebagai penyelamat eksistensi Republik Indonesia pada masa kritis. Dengan demikian, perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan tidak hanya memiliki arti penting dalam sejarah lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap sejarah nasional Indonesia, khususnya dalam mempertahankan kedaulatan negara pada masa Revolusi Fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amura. (1979). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945–1952*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1978). *Sejarah Sumatra Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Kahin, G. M. T. (2003). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mansoer, M. D., Imran, A., Safwan, M., Asmaniar, Z. I., & Buchari, S. I. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- Notosusanto, N. (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: UI Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Taufik Abdullah, dkk. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah: Pasca Revolusi*. Yogyakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.

Zed, M. (2004). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang.